

**KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED
JOESOEUF DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA PADA TAHUN 1978-1983**

(SKRIPSI)

Oleh :

**MURNIYATI
2013033025**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED JOESOEF DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA TAHUN 1978-1983

Oleh

MURNIYATI

Pada tahun 1978-1983 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjabat saat Kabinet Pembangunan III yaitu Daoed Joesoef. Pada masa Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan sebagai pembaharuan pada bidang pendidikan di Indonesia pada tahun 1978-1983. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa sajakah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia pada tahun 1978-1983?”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia pada tahun 1978-1983. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian sejarah (historis). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Daoed Joesoef yaitu kebijakan NKK/BKK untuk menormalkan kampus dari pengaruh politik praktis di kampus. Selanjutnya kebijakan sistem tahun ajaran baru kebijakan tersebut untuk menyesuaikan tahun ajaran yang ada di Indonesia dengan tahun ajaran yang ada di negara Amerika dan Eropa. Kebijakan yang lain yaitu mengenai libur sekolah pada bulan puasa dengan begitu siswa harus melaksanakan belajar dan pembelajaran selama bulan puasa. Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef tersebut menyebabkan beberapa dampak positif dan dampak negatif. Meskipun kebijakan tersebut mendapat tanggapan kurang menyenangkan dari masyarakat, termasuk orang tua, siswa, dan beberapa tokoh agama. Kebijakan ini juga membawa dampak positif yang signifikan dimana kebijakan tersebut mengembangkan pendidikan di Indonesia pada tahun 1978-1983, sehingga pada tahun tersebut pendidikan terus mengalami perkembangan.

Kata kunci: Kebijakan Menteri, Daoed Joesoef, Perkembangan Pendidikan

ABSTRACT

THE POLICY OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE DAOED JOESOEF IN DEVELOPING EDUCATION IN INDONESIA IN 1978-1983

By

MURNIYATI

In 1978-1983 the Minister of Education and Culture who served during the Third Development Cabinet was Daoed Joesoef. During Daoed Joesoef's time as Minister of Education and Culture, he implemented policies in the field of education as a renewal in the field of education in Indonesia in 1978-1983. The formulation of the problem in this study is "What are the policies of the Minister of Education and Culture Daoed Joesoef in developing education in Indonesia in 1978-1983?". The purpose of this research is to describe the policies of Minister of Education and Culture Daoed Joesoef in developing education in Indonesia in 1978-1983. The method used is historical research method. The data collection techniques used are documentation techniques and literature study techniques. The results showed that the policy issued by Daoed Joesoef was the NKK / BKK policy to normalize the campus from the influence of practical politics on campus. Furthermore, the new school year system policy is to adjust the school year in Indonesia with the school year in America and Europe. Another policy is regarding school holidays during the fasting month, so students must carry out learning and learning during the fasting month. The policy issued by Minister of Education and Culture Daoed Joesoef caused several positive and negative impacts. Although the policy received unfavorable responses from the community, including parents, students, and some religious leaders. This policy also had a significant positive impact where the policy developed education in Indonesia in 1978-1983, so that in those years education continued to experience development.

Keywords: Ministerial Policy, Daoed Joesoef, Education Development

**KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAOED
JOESOEF DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA PADA TAHUN 1978-1983**

Oleh

MURNIYATI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAOED JOESOEFF DALAM
MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN DI
INDONESIA PADA TAHUN 1978-1983**

Nama Mahasiswa : **Murniyati**

No. Pokok Mahasiswa : **2013033025**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Drs. Maskun, M.H.
NIP. 195912281985031005

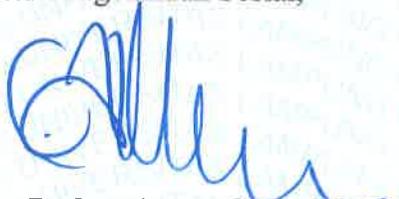
Pembimbing II



Sumargono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198801082019031012

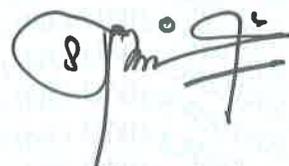
2. Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,



Dr. Dedy Miswar, S. Si., M. Pd.
NIP. 197411082005011003

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah,



Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Maskun, M.H.**

Sekretaris : **Sumargono, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Syaiful M, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP. 19651230 199111 1001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juni 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Murniyati
NPM : 2013033025
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Unila
Alamat : Desa Dadirejo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten
Tanggamus, Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang penuh diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024



Murniyati
NPM. 2013033025

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Dadirejo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 08 Juni 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Tukidi dan Ibu Suparti. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Wonosobo (2006-2013), melanjutkan pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo (2013-2016), kemudian melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Semaka (2016-2019). Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Pada semester VI penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dan melaksanakan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Negara Batin yang terletak di Kelurahan Negara Batin, Kecamatan Negara, Kabupaten Way Kanan. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan yang antara lain seperti Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (HIMAPIS) sebagai anggota bidang kerohanian (2020-2021) dan sebagai ketua bidang kesekretariatan (2022), Forum Komunikasi Mahasiswa (FOKMA) Pendidikan Sejarah sebagai anggota BPOK (2022) dan menjadi ketua bidang dana dan usaha (Danus) (2023).

MOTTO

“Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Tidak bangsa yang maju, yang tidak didukung pendidikan yang kuat”

(Dr. Daed Joesoef)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala hidayah dan juga karunia-Nya.
Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, maka ku persembahkan sebuah karya ini sebagai tanda cinta dan juga sayangku kepada:

Kedua orangtua ku **Bapak Tukidi dan Ibu Suparti** yang telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, banyak pengorbanan, serta kesabaran yang luar biasa. Terima kasih atas setiap tetes keringat, serta telah membimbing dan memberi ku motivasi, dan juga selalu mendo'akan ku di setiap sujudnya sehingga aku diberikan kemudahan dalam menjalankan studi, serta selalu berjuang agar aku dapat menggapai segala cita-cita ku, sungguh semua hal baik yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada ku tidak akan mungkin terbalaskan.

Untuk Almamater Tercinta
“UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWACANA

Alhamdulillahirrobbil'aalamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu dinantikan di Yaumul Qiyamah kelak, Aamiin. Penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam Mengembangkan Pendidikan di Indonesia pada Tahun 1978-1983” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

7. Bapak Drs. Maskun, M.H., selaku dosen Pembimbing 1 skripsi penulis, terima kasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Sumargono, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Pembimbing II skripsi penulis sekaligus Dosen PA, terima kasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, motivasi, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
10. Bapak dan Ibu staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
11. Ucapan terima kasih yang terdalem kepada diri sendiri, Murniyati yang sudah berjuang sejauh ini di titik terbaik yang sudah Allah siapkan.
12. Teruntuk kedua orangtua ku yang sangat ku cintai, Bapak Tukidi dan Ibu Suparti, terima kasih telah menjadi penyemangat dan memberikan ridho, doa, serta dukungannya kepada saya selama saya menempuh pendidikan.
13. Teruntuk Kakak ku yang paling kusayangi Eko Santuso, terima kasih banyak karena sudah menjadi penyemangat dari mulai awal kuliah sampai sekarang, terima kasih telah mendo'akan dan membantu selama saya menempuh jenjang perkuliahan.
14. Teruntuk Saudaraku Dek Yuli, Dek Puji, Bulek Jemi dan Lek Amin sekeluarga terima kasih telah memberikan banyak bantuan terutama mengizinkan saya untuk dapat tinggal di tempat ternyaman, tempat pulang dari segala permasalahan selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan dan terima kasih atas motivasi serta kepeduliannya selama saya tinggal di rumahnya.
15. Teruntuk Saudara sekaligus teman cerita ku Bik Nur Kholisoh, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dari permasalahan-permasalahan yang penulis alami selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
16. Teruntuk keponakan tersayang Kakak Qiano dan Adek Qiaro terima kasih telah menjadi penyemangat ketika lelah dan terima kasih atas segala cinta yang telah diberikan.

17. Teruntuk Bude Nani dan Pakde Muh sekeluarga, terima kasih banyak atas segala motivasi dan semangat selama saya menempuh perkuliahan.
18. Teruntuk sahabat-sahabat ku di “Kerajaan Budaya”: Afaf Nafisah, Irma Meiyanti, Yanah Dewi Lestari, dan Yulia Khoirunnisa terima kasih karena sudah menjadi orang-orang yang paling banyak membantu, memberi motivasi dan terima kasih atas semua kebaikan kalian selama penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Pendidikan Sejarah.
19. Teruntuk sahabat ku di kampung Mbak Rani Ramadhani, Dwi Famili Rahmawati, Widiya Astuti, Rensy Nindy Josinama, Jian Rahmadani dan Wike Anindhita terima kasih banyak atas dukungan, tempat bercerita dan teman seperjuangan selama ini.
20. Teruntuk teman dekat ku Faiza Nur Rohmah, Rizky Pahlevi, Nuri Muthi Latifah, Imroah Laina Retno Mukti Kusuma, Mia Nurlita, Iskandar, Kristian Ludovikus Marbun dan Alifian Faridz Ramadhan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah.
21. Teman-teman seperbimbingan PA, Assatulaini, Alfiani Rahmadani, Yolanda Noviyanti, Milarisa, Dita Adelia Kharisma dan Muhammad Nur Wahyudi terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
22. Teman-teman KKN di Kampung Negara Batin dan PLP di SMAN 1 Negara Batin, terima kasih banyak untuk semangat dan kebersamaannya selama melakukan Kuliah Kerja Nyata dan Pengenalan Lapangan Persekolahan.
23. Kakak tingkat dan adek tingkat di Program Studi Pendidikan Sejarah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas motivasi dan bantuannya selama penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Pendidikan Sejarah.
24. Teruntuk teman seperjuangan di Program Studi Pendidikan Sejarah angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas semua dukungan dan motivasi yang kalian berikan, semua hal yang sudah kita lalui sampai sejauh ini, segala cinta, kebersamaan, dan juga kasih sayang yang kalian berikan yang tidak akan pernah saya lupakan selama melaksanakan kegiatan perkuliahan di Program Studi Pendidikan Sejarah tercinta ini.

Semoga hasil dalam penyusunan skripsi ini dapat memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa dan bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 Juni 2024

Murniyati
NPM. 2013033025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.6.2 Manfaat Praktis	6
1.7 Kerangka pikir	6
1.8 Paradigma Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Kebijakan Menteri	9
2.1.2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	10
2.1.3 Biodata Daoed Joesoef.....	12
2.1.4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Era Daoed Joesoef	15
2.1.5 Perkembangan Pendidikan.....	17
2.1.6 Konsep Pendidikan	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	23

3.1.1	Objek Penelitian	23
3.1.2	Subjek Penelitian	23
3.1.3	Tempat Penelitian	23
3.1.4	Waktu Penelitian	23
3.1.5	Temporal Penelitian	23
3.1.6	Bidang Penelitian	23
3.2	Metode Penelitian	23
3.2.1	Metode Historis	24
3.3	Teknik Pengumpulan Data	31
3.4	Teknik Analisis Data	34
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1	Hasil	35
4.1.1	Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef	35
4.1.2	Dampak dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef Tahun 1978-1983	57
4.1.3	Perkembangan Pendidikan Tahun 1978-1983	68
4.2	Pembahasan	83
4.2.1	Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam Mengembangkan Pendidikan di Indonesia Pada Tahun 1978-1983	83
V.	SIMPULAN DAN SARAN	92
5.1	Simpulan	92
5.2	Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. SK No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus.....	40
2. SK No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah	45
3. SK No. 0211/U/1978 pada pasal 12 dan pasal 13.....	47
4. SK No. 0211/U/1978, Pasal 6 tentang Waktu Libur pada Bulan Puasa	50
5. SK No. 0211/U/1978 Pasal 2 tentang Fungsi Waktu Libur	51
6. Majalah Serial Media Dakwah-62 membahas tentang Sekali lagi Sekularisasi Dan Sekularisme	56
7. SK No. 0226/K/1978 tentang Pungutan dan Penggunaan SPP-SL Akibat adanya Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah	63
8. Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD	70
9. Perkembangan Angka Partisipasi SD	71
10. Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTP	74
11. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTs	75
12. Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTA.....	78
13. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA.....	79
14. Perkembangan Peminatan Siswa SLTA pada Perguruan Tinggi.....	81

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang ada di Indonesia harus diatasi dengan berbagai solusi yang ada, salah satu permasalahan yang ada adalah permasalahan dalam bidang pendidikan. Diterapkannya suatu kebijakan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut (Diputera, 2022). Pelaksanaan dalam pendidikan tidak terlepas dari kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang di dalam institusi pendidikan, baik lembaga negeri maupun swasta. Melalui analisis kebijakan, dapat dipahami secara tepat terkait keputusan pemerintah atau pihak terkait dalam mengelola pendidikan (Arwildayanto, 2018). Kebijakan berperan sebagai modal utama pemerintah dalam mengatur berbagai aspek di dalam kehidupan masyarakat (Madjid, 2018).

Kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam ranah bernegara, tentunya terdapat dampak yang akan dirasakan di berbagai bidang. Dampak yang timbul tersebut tidak hanya dirasakan oleh bidang yang dimana kebijakan tersebut dikeluarkan, namun berdampak terhadap bidang lainnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan tentu akan berpengaruh luas terhadap aspek kehidupan bermasyarakat. Penting untuk diakui bahwa membangun SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan prioritas dalam membangun negara. Meskipun bidang-bidang lainnya telah dikembangkan, tanpa adanya perhatian pada pendidikan, masyarakat sulit menjaga dan mengelola kemajuan tersebut. Peningkatan fokus dan perbaikan dalam pendidikan akan seiring berjalannya waktu akan meningkatkan kualitas SDM, yang akan memberikan perkembangan dalam dampak positif pada kemajuan dan kemandirian negara (Chairunisa, 2018).

Seiring pergantian pemerintahan yang berkuasa maka pendidikan nasional bangsa Indonesia mengalami berbagai fase sejarah yang dialami. Pergantian tersebut dimulai dari masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi yang berlangsung

pada saat ini (El-As'ady, 2005). Pada masa sebelum era reformasi, gambaran pendidikan di Indonesia menunjukkan ciri-ciri yang sentralistik dalam kebijakan pendidikan nasional. Pada waktu tersebut, perhatian terhadap identitas lokal dan potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi pada keberagaman pendidikan nasional belum terlalu ditekankan. Diberlakukannya kebijakan-kebijakan terkait pendidikan tentunya akan mengembangkan sistem pendidikan kearah yang lebih baik (Haerullah, 2020).

Berbagai langkah diterapkan dalam pendidikan supaya berubah ke arah yang lebih baik tentu saja memerlukan seseorang menteri pendidikan yang memiliki kualitas yang memumpuni serta mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan yang tentunya dapat membawa dunia pendidikan dalam kemajuan (Sholihat, 2020). Menteri pendidikan dan kebudayaan ditugaskan dalam mengatur pendidikan Indonesia di bawah pengawasan presiden. Menteri pendidikan bertugas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa periode yang telah ditentukan. Tugas dan wewenang yang diberikan tentunya akan berfokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Tugas-tugas yang akan direncanakan yaitu menetapkan kurikulum, metode dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai pemegang mandat rakyat yang berfokus dalam bidang pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki formulasi kebijakan yang efektif dalam mengatasi ketimpangan pendidikan yang tentunya dapat mencapai tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentu akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan membawa pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Menurut Maguire (2019), menyebutkan dalam menyusun instrument kebijakan pendidikan, tentu tidak boleh melupakan nilai kesetaraan dan keadilan sosial sebab pendidikan merupakan hak seluruh warga negara, tanpa harus melihat sesuai gender dan suku, oleh karena itu harus dijamin oleh pemerintah. Adanya pendidikan maka dapat melahirkan manusia yang mampu memperkenalkan nilai dalam keadilan dan membantu pembangunan negara. Kebijakan yang akan dikeluarkan pasti memiliki potensi untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia,

baik dalam hal yang berkualitas, aksesibilitas, dan hubungan pendidikan dalam kebutuhan masyarakat serta pasar kerja.

Masa orde baru yang bertepatan pada tahun 1968-1998 adalah masa dimana banyak yang mengartikan sebagai masa pembangunan nasional. Orde baru juga diartikan sebagai masa pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadi sumber dasar berbagai cara yang dilakukan untuk membangun pendidikan yang akan dibangun dan dijalankan pada periode tersebut guna pembangunan dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pendidikan pada masa orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang merupakan pemimpin yang terkenal dengan semboyan pembangunan (Safei, 2020). Masa orde baru memiliki banyak kebijakan yang diterapkan salah satunya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Perkembangan pendidikan pada umumnya disertai dengan kebijakan pendidikan yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan baik dari sekolah maupun perguruan tinggi guna meningkatkan pendidikan sehingga tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan kebijakan pendidikan pada masa orde baru yaitu Daoed Joesoef yang menjabat pada tahun 1978-1983.

Permasalahan yang ada pada bidang pendidikan pada masa Menteri Daoed Joesoef merupakan permasalahan yang sama saat Menteri Syarif Thayeb menjabat. Permasalahan yang ada yaitu mengenai peningkatan mutu pada pendidikan dan juga perluasan kesempatan pendidikan. Ketika Daoed Joesoef menjabat, dia melanjutkan program Syarif Thayeb yaitu mengenai pemerataan pada pendidikan dan peningkatan pendidikan. Kondisi ekonomi yang stabil saat Daoed Joesoef menjabat menjadi kesempatan yang baik dalam mengupayakan terlaksananya pemerataan pendidikan (Poesponegoro, 2008). Menteri Daoed Joesoef tidak hanya mengupayakan terlaksananya pemerataan pendidikan, namun juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikan guna tercapainya perkembangan dalam dunia pendidikan.

Menurut Sholihat (2020), Daoed Joesoef diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh presiden Soeharto tepatnya pada 3 April 1978. Daoed Joesoef yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, banyak mengeluarkan kebijakan yang menurutnya kebijakan tersebut dapat membawa pendidikan Indonesia ke arah kemajuan. Beberapa kebijakan yang dikeluarkannya yaitu kebijakan NKK/BKK, Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah dan Perubahan Libur di Bulan Puasa. Kebijakan yang 1) Kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan) merupakan kebijakan yang diterapkan di lingkungan kampus dengan tujuan mematikan aktivitas politik di kampus, 2) Kebijakan Sistem Tahun Ajaran Sekolah merupakan kebijakan penetapan tahun ajaran baru yang sebelumnya dilaksanakan di bulan Desember diubah di bulan Juli dengan salah satu tujuannya yaitu menyesuaikan tahun ajaran di luar negeri seperti Eropa dan Amerika, 3) Kebijakan Perubahan Libur di Bulan Puasa, menurut Daoed Joesoef libur pada bulan puasa merupakan salah satu bentuk pembodohan yang dilakukan pemerintah Belanda karena ketika diberlakukan libur maka anak-anak akan tertinggal dalam menguasai ilmu pengetahuan.

Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjabat saat itu, menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang tentu akan mewarnai dunia pendidikan pada era orde baru tepatnya tahun 1978-1983. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Daoed Joesoef di dalam bidang pendidikan akan membawa Indonesia dalam perkembangan pendidikan guna mencapai kemajuan bangsa. Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik dalam mengkaji lebih mendalam mengenai kebijakan yang dikeluarkan Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, maka penulis tertarik dalam penelitian tersebut sehingga rancangan judul peneliti yaitu “Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan Pendidikan di Indonesia Tahun 1978-1983”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Latar Belakang diberlakukannya Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef Tahun 1978-1983
- 1.2.2 Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan Pendidikan di Indonesia Tahun 1978-1983 berupa kebijakan sistem tahun ajaran baru, kebijakan libur pada bulan puasa, dan kebijakan NKK/BKK.
- 1.2.3 Dampak Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia Tahun 1978-1983

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian hanya tentang “kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983 berupa kebijakan sistem tahun ajaran baru, kebijakan libur pada bulan puasa dan kebijakan NKK/BKK”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apa sajakah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu;

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah serta tujuan dari penelitian ini, yaitu mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Universitas Lampung

Menjadi sumber referensi bagi seluruh civitas akademika dan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan pengetahuan mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

b) Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan pengetahuan baru dalam analisis kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

c) Bagi Penulis

Memberikan pengalaman penelitian dan wawasan pengetahuan baru mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

d) Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan mengenai sejarah nasional khususnya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

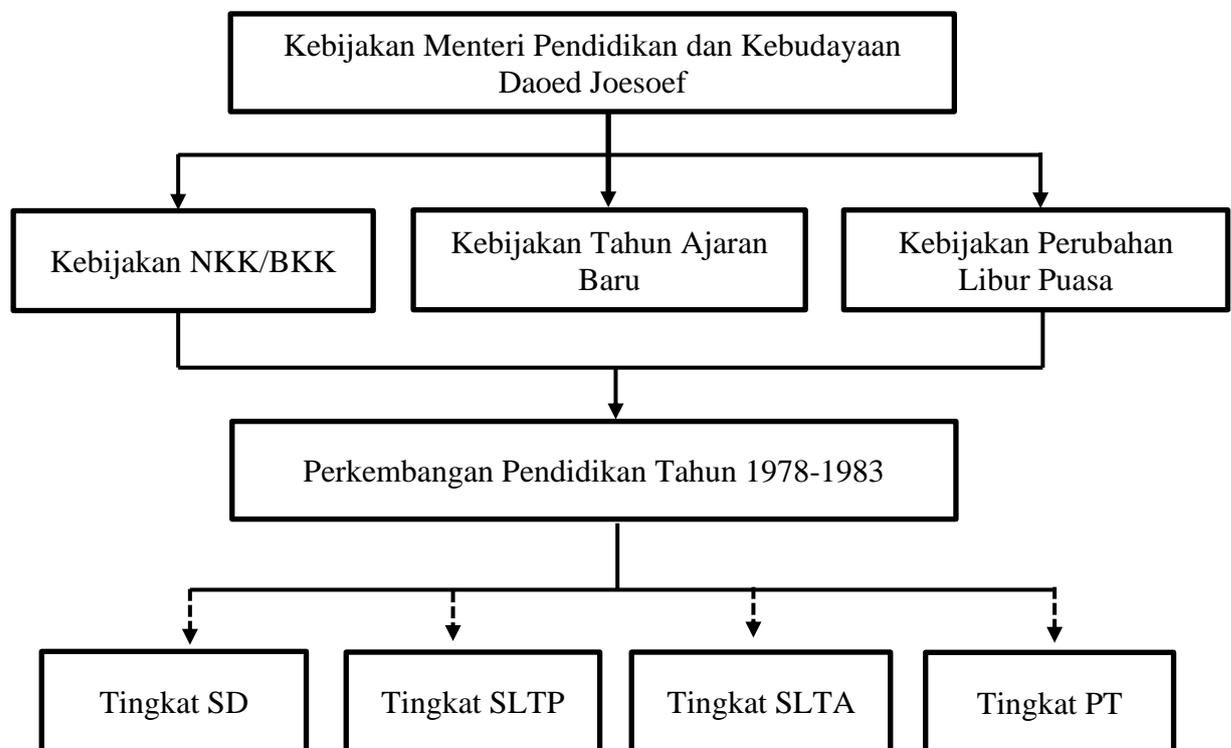
1.7 Kerangka pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah: Daoed Joesoef merupakan menteri pendidikan dan kebudayaan yang menjabat pada periode 1978-1983. Daoed Joesoef menjadi menteri pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Menteri di Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan yang menjabat sebelumnya

yaitu Syarif Thayeb. Pengangkatan Daoed Joesoef sebagai Menteri pada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan diminta langsung oleh presiden Soeharto pada masa kabinet pembangunan III. Daoed Joesoef yang merupakan lulusan dari fakultas ekonomi untuk menjadi menteri pendidikan pada saat itu. Pada saat menjabat, Daoed Joesoef mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurutnya kebijakan tersebut dalam membawa pendidikan Indonesia kearah yang lebih baik.

Daoed Joesoef yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan banyak hal yang harus dihadapinya seperti dikeluarkannya kebijakan yang tentunya akan membawa pada perkembangan pendidikan di ranah SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi serta generasi muda kedepannya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak selalu berjalan mulus sebab kebijakan yang dikeluarkan yang dapat digolongkan terlalu keras. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diantaranya kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan), Perubahan Sistem Tahun Ajaran Sekolah dan Perubahan Libur di Bulan Puasa. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan tersebut dilakukan guna mengembangkan pendidikan pada jenjang SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi pada saat Daoed Joesoef menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan III tepatnya pada tahun 1978-1983.

1.8 Paradigma Penelitian



—————> : Garis pengaruh

- - - - -> : Garis Perkembangan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kebijakan Menteri

Menurut Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Taufiqurakhman, 2014).

Menurut Noeng Muhadjir (2010) kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan setidaknya harus memenuhi empat kriteria penting agar dapat dilaksanakan menjadi sebuah keputusan; yakni 1) tingkat hidup masyarakat meningkat, 2) terjadi keadilan *by the law social justice*, 3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dan 4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan

Nurcholis (2007) juga mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku oleh; 1) kelompok sasaran maupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan, 2) ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri -menterinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara". Adapun tugas menteri berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Kementerian Negara) adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menurut Siregar (2021), peran menteri dalam menyelenggarakan pemerintahan berperan sangat besar. Karena itulah para menteri yang dipilih dituntut untuk mempunyai sifat yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab atas jabatan tersebut.

Menjadi seorang menteri adalah menjadi seorang pembantu presiden, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUD NRI 1945 *Jo* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Seorang pembantu presiden yang berwenang dan berkuasa mengambil kebijakan publik. Karena memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengambil kebijakan publik, maka sebagai pembantu presiden, seorang menteri harus menyanggah etika dan tanggung jawab publik. Selain itu, untuk menjadi seorang menteri merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi yang tinggi.

Maka dengan itu, keputusan menteri merupakan dari kebijakan menteri itu sendiri. Keputusan menteri termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat *messo* atau menengah atau disebut juga dengan penjabar pelaksanaan. Kebijakan *messo* dapat berbentuk Surat Edaran Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakan ini dapat berbentuk juga Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri.

2.1.2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini dikenal sebagai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun

2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang mengurus berbagai aspek Pendidikan seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, kebudayaan, riset, dan pengembangan teknologi. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, dan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).

Menurut Kemendikbud, dalam sejarahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945-1950 bukan untuk mencerdaskan para kaum pribumi, namun terdapat kepentingan yang lain yaitu kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini, semangat dalam mengobarkan semangat ke-Indonesia-an begitu terlihat hal tersebut merupakan bagian dari membangun sebuah bangsa yang merdeka. Organisasi yang saat itu bernama Kementerian Pengajaran terlihat sangat sederhana. Namun dalam hal kurikulum sudah memiliki kesadaran dalam hal menyiapkannya. Menteri Pengajaran yang pertama pada saat itu adalah Ki Hajar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan oleh Mr. Mulia. Pada masa jabatannya, beliau berupaya dalam meneruskan program dan kebijakan Menteri sebelumnya pada bidang kurikulum yang berwawasan kebangsaan, meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.

Pada Kabinet Syahrir II, Menteri pengajaran yang menjabat yaitu Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri pengajaran dipercayakan oleh Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada masa kepemimpinan Mr. Soewandi membentuk Panitia Penyelidikan Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya pada era Demokrasi Liberal (1951-1959) terdapat beberapa kali pergantian Kabinet. Kabinet Natsir menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Selanjutnya

berganti kabinet yaitu kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri (PP dan K). Kemudian Dr. Bahder Johan menjabat sekali lagi kemudian digantikan oleh Mr. Mohammad Yamin, RM Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto dan Prof. Dr. Prijono.

Pada kabinet kerja I (10 Juli 1959-18 Februari 1960) status kementerian diubah menjadi Menteri muda. Kementerian mengenai Pendidikan dibagi kedalam tiga Menteri yang menjabat yaitu salah satunya Menteri Muda PP dan K yang dipegang oleh Sudibjo. Selanjutnya memasuki Era Orde Baru (1966-1998) yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa ini banyak kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan salah satunya kebijakan saat Daoed Joesoef menjabat sebagai Menteri P dan K atau yang dikenal dengan nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan nama kementerian pada saat itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan tersebut antara lain NKK/BKK, sistem tahun ajaran baru dan libur pada bulan puasa.

2.1.3 Biodata Daoed Joesoef

Daoed Joesoef lahir pada tanggal 8 Agustus 1926 di Medan. Daoed Joesoef dilahirkan dari pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Jasiah yang berasal dari sebuah tempat yang bernama Jeron Beteng, Yogyakarta. Pasangan Moehammad Joesoef dan Siti Jasiah merupakan seorang yang tinggal di kampung yang buta huruf dan tidak mengenyam pendidikan formal, disisi lain pasangan tersebut mempunyai kemampuan membaca huruf Arab yang baik serta memiliki pemahaman agama dan Al-Qur'an baik sehingga menjadi bekal yang kuat dalam mendidik anak-anaknya (Joesoef, 2010).

Masa kecil sampai remaja Daoed Joesoef banyak dihabiskan di Kota Medan. Pendidikan pada Sekolah Dasar ditempuh di *Holland Inlandsche School* (HIS) Medan diselesaikan pada tahun 1939. Pada saat menduduki bangku Sekolah Dasar, Daoed Joesoef mahir dalam seni melukis. Ibunya harus mengeluarkan biaya yang cukup dalam untuk membeli peralatan

untuk melukis. Dengan begitu kemahiran dalam melukis dimanfaatkan Daoed Joesoef untuk mencari uang di perantauan (Kompas, 2018).

Setelah menamatkan sekolah di HIS, Daoed Joesoef melanjutkan studi di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Kota yang sama. Namun, pada pertengahan 1942 kekuasaan beralih ke tangan Militer Jepang, akhirnya Daoed Joesoef menyelesaikan pendidikannya pada Lembaga pendidikan yang pada saat itu diberi nama MULO *Tjuu Gakko* Medan. Daoed Joesoef menamatkan pendidikan di tahun 1944. Selama menempuh pendidikan belum diketahui siapa yang membiayai pendidikan Daoed Joesoef karena mengingat orang tuanya bukan dari kalangan yang berkecukupan, terlebih pada masa Jepang yang pada saat itu suasananya serba susah.

Pada Tahun 1959 Daoed Joesoef lulus sebagai *doctorandus* di FEUI. Sembari menyumbangkan keahliannya melalui badan yang bersangkutan dengan ketentaraan, yaitu sebagai anggota Team IRJENTERPRA/Asisten Urusan Angkatan Dasar Penguasa Perang Tertinggi (1959-1960), di Jakarta hal tersebut merupakan karir yang semakin jelas karena Daoed Joesoef mengambil jalur akademis diantaranya yaitu:

1. Pada tahun 1956 ia mulai menjadi staf pengajar di *alma maternya*, di samping menjadi “dosen terbang” untuk Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sampai 1959.
2. Pada tahun 1958 sampai 1965 Daoed Joesoef menjadi Lektor Ekonomi Moneter dan Keuangan Negara di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
3. Pada tahun 1959-1963 menjadi Ketua Team Afiliasi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia-Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
4. Pada tahun 1960-1965 menjadi dosen mata kuliah Uang dan Bank di Akademi Bank Jakarta
5. Pada tahun 1962-1965 menjadi Kepala Jurusan Ekonomi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

6. Pada tahun 1964-1965 beliau merangkap jabatan menjadi Kepala Jurusan Ekonomi pemerintahan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (Soesastro, 1996).

Pada Tahun 1964 Daoed Joesoef mendapat beasiswa *Ford Foundation* untuk menjadi studi pascasarjana di Amerika Serikat. Tahun 1963 Daoed Joesoef juga mengunjungi *University of California, Berkeley*, dimana beasiswa tersebut diminta agar bisa digunakan belajar di Paris dan permintaan Daoed Joesoef tersebut diterima sehingga pada tahun 1964 pada musim gugur banyak mengumpulkan informasi seperlunya untuk kemungkinan Daoed Joesoef menuntut ilmu di Paris. Pada tahun berikutnya Daoed Joesoef bermukim di Paris didampingi oleh sang istri dan anak putrinya, Yanti. Tahun 1967 daoed Joesoef sudah memperoleh gelar *Docteur de l'Universite, mention droit* (Hukum) dari *Faculte de Droit et des Sciences Economiques, Universite de Paris*. Studi di Paris tetap dilanjutkan oleh Daoed Joesoef, kemudian sejak tahun 1970 dengan beasiswa CSIS Jakarta, sehingga memperoleh gelar akademis paling prestisius di Prancis, yaitu *Docteur d'Etat*, dalam ilmu ekonomi dari *Universite de Paris I Pantheon-Sarbonne* pada tahun 1973 (Soesastro, 1996).

Setelah menyelesaikan studinya di Sorbonne, Daoed Joesoef kembali mengabdikan di almaternya. Kecemerlangannya dalam bidang ekonomi segera menarik perhatian pemerintah Orde Baru, yang kemudian merekrutnya ke dalam Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Kisah keterlibatannya di CSIS dimulai pada tahun 1969, ketika Sofjan Wanandi, atas tugas dari Ali Moertopo (Asisten Pribadi Bidang Khusus Presiden Soeharto), berkeliling Eropa dan bertemu dengan para intelektual muda Indonesia di berbagai kota. Salah satu yang ditemuinya adalah Daoed Joesoef, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Perancis pada waktu itu. Terkesan dengan kecerdasan dan kekritisannya, Sofjan mengajak Daoed untuk bergabung dalam CSIS. Keterlibatannya di CSIS segera mengangkat namanya, dan ia beberapa kali menduduki posisi strategis di lembaga

tersebut (Joesoef, 2017). Antara tahun 1970-1973, ia menjabat sebagai Direktur CSIS, dan pada tahun 1976-1978, ia menjadi anggota Research CSIS di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat. Tahun 1974, setelah kepulangan Daoed Joesoef dari menempuh pendidikan di Prancis, Daoed Joesoef mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai Lektor Ekonomi Pembangunan sampai 1978, kemudian Daoed Joesoef meminta berhenti dari jabatan Lektor karena disaat bersamaan Daoed Joesoef ditugaskan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Soesastro, 1996).

2.1.4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Era Daoed Joesoef

Daoed Joesoef yang merupakan seorang ilmuwan ekonomi harus diberikan tugas dalam menjalankan wewenang di dunia pendidikan. Menurut Daoed Joesoef dalam Sardiman (2012) pengangkatan Daoed Joesoef sebagai menteri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia karena semasa Daoed Joesoef menjalani pendidikan di Sarbonne, mempertemukan ia dengan Muhammad Hatta yang pada saat itu tengah menjalani pengobatan sakit jantung. Ketika di Sarbonne Hatta dan Daoed Joesoef banyak berdiskusi dan bernostalgia mengenai banyak hal. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, Daoed Joesoef kembali ke Indonesia. Selang beberapa waktu dari kepulangannya, Daoed Joesoef diminta Hatta untuk datang kerumahnya.

Daoed Joesoef yang dengan antusias menerima undangan tersebut datang membawa konsep ekonomi karena ia berpikiran bahwa Hatta akan berdiskusi mengenai ekonomi. Disaat bersamaan, di rumah Hatta sudah ada Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, hingga pada akhirnya Daoed Joesoef terheran-heran sebab yang didiskusikannya mengenai pembangunan dan pendidikan. Tahun 1978 saat selesainya pemilu, Daoed Joesoef dipanggil Soeharto dan diamanahkan menjadi menteri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978-1983 saat kabinet pembangunan III.

Perjalanan Daoed Joesoef dalam pemerintahan yang tergabung dalam Kabinet Pembangunan III masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Daoed Joesoef adalah salah satu dari banyaknya menteri yang menjabat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih tepatnya disebut juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa orde baru. Menurut Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sangatlah penting karena berkaitan erat dengan generasi masa depan. Seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki tanggung jawab “manusiawi”, tidak hanya mengurus “*human investment*” namun membantu juga dalam peserta didik untuk menunaikan tugas yang harus dikerjakan dengan baik (Sardiman, 2012).

Daoed Joesoef seseorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 1978-1983, dimana pada periode Daoed Joesoef menjabat sebagai Menteri Pendidikan beliau sudah menyiapkan sebuah konsep pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, dimana konsep tersebut dirancang sebagai acuan dalam membangun masa depan bangsa melalui peran generasi muda di bidang pendidikan. Menurut Daoed Joesoef, generasi muda merupakan harapan sekaligus menjadi manusia masa depan kelak sehingga terdapat sebuah nilai investasi jika diberikan ilmu yang cukup pada generasi muda (Joesoef, 2017).

Daoed Joesoef sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978-1983 banyak membuat kebijakan-kebijakan dan setiap kebijakan yang dikeluarkannya memiliki sebuah arti tertentu khususnya dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Daoed Joesoef mendapatkan berbagai tanggapan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia.

2.1.5 Perkembangan Pendidikan

Perkembangan dalam teori komparatif dan organismik dikemukakan Heinz Werner (1890-1964) berpendapat bahwa perkembangan yang terjadi tidak hanya dipacu pada peningkatan ukuran, namun juga pada perubahan-perubahan yang terjadi. Werner menyatakan:

“Kapan pun perkembangan berlangsung, dia melangkah maju dari kondisi yang relatif tidak memiliki banyak perbedaan menuju kondisi yang perbedaan dan integrasi hirarkisnya semakin tinggi [Whenever development occurs, it proceeds from a state of relative lack of differentiation to a state of increasing differentiation and hierarchic integration]” (Werner dan Kaplan, 1957).

Erik Erikson (1902) dalam Masganti Sitorus (2012) menyatakan bahwa perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia. Erikson meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. Kesuksesan atau kegagalan menangani konflik dapat berpengaruh pada setiap tahap perkembangan.

Beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan secara umum, jika dilihat di bidang pendidikan maka perkembangan pendidikan menurut Abdul Rahmat (2014) masih mengacu pada:

- a) Popularisasi pendidikan
- b) Sistematisasi pendidikan
- c) Proliferasi pendidikan
- d) Politisasi pendidikan.

Empat paradigma tersebut merupakan dasar dari pengembangan pendidikan nasional. Oleh karena itu setelah kita analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan di masa dulu, dan masa sekarang maka kita dapat berpikir, dan rekayasa pengembangan pendidikan dimasa yang akan datang dengan paradigma baru.

Kebijakan pendidikan yang diberlakukan berharap akan membawa perubahan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan berhasil atau tidaknya sesuatu kebijakan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh pemerintah tentu akan menunjukkan bagaimana pelaksanaan yang ada di lapangan.

2.1.6 Konsep Pendidikan

Menurut Lalo (2018) menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar terencana dalam menyiapkan peserta didik sesuai dengan tantangan zaman, juga perlu menjadi perhatian, bahwa proses pembelajaran kontekstual akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, karena selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata dengan konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya.

Menurut Suharto (2005) pendidikan sudah dikenal sejak zaman sebelum Negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Pendidikan menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk karakter pribadi setiap orang apabila sungguh-sungguh dalam menekuninya. Pendidikan adalah proses pembelajaran tentang akhlak, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menjadi kebiasaan turun-temurun sekelompok orang untuk melakukan pengajaran, pengamatan, pelatihan atau penelitian.

Segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu maupun kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Menurut Notoatmodjo (2003), unsur-unsur pendidikan meliputi : 1) Input yaitu sasaran pendidikan dan pendidik (pelaku pendidikan). 2) Proses yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain. 3) Output yaitu tentang apa yang diharapkan atau perilaku. Menurut Undang - Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. Menurut Undang - Undang Pendidikan Nomor 9 Tahun 2009, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Jenjang Pendidikan menurut Undang–Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 yang dimaksud dengan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor).

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (Pasal 13). Warga negara yang berumur enam tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, sedangkan yang berumur tujuh tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 14). Pendidikan dasar merupakan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan

timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang sederajat (Pasal 15).

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma: Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu berguna sebagai perbandingan penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian terdahulu yang memiliki topik sejenis diantaranya:

1. Penelitian dengan judul “Dinamika Pendidikan Pada Masa Orde Baru (Kebijakan Daoed Joseof Dan Nugroho Notosusanto)” yang ditulis oleh Sardiman dan Rhoma Dwi Aria Yulianti yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012 yang membahas mengenai keterkaitan antara kebijakan Daoed Joesoef dan kebijakan Nugroho Notosusanto yang terjadi pada masa orde baru.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu oleh Sardiman dan Rhoma Dwi Aria Yulianti dengan penelitian yang akan hendak dikaji diantaranya:

- a. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai kebijakan Daoed Joesoef dan dalam penelitian tersebut terdapat profil Daoed Joesoef

yang mana mengangkat perjalanan Daoed Joesoef menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan.

- b. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai kebijakan Daoed Joesoef dan kebijakan Nugroho Notosusanto yang sama-sama menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan namun berbeda masa periode, penelitian sebelumnya lebih menekan pada keterkaitan antara kebijakan Daoed Joesoef dan kebijakan Nugroho Notosusanto, sedangkan penelitian yang akan dikaji adalah mengenai kebijakan Daoed Joesoef yang terdiri dari tiga kebijakan (kebijakan NKK/BKK, kebijakan sistem tahun ajaran baru dan kebijakan libur bulan Ramadhan) dimana hal tersebut membawa Indonesia dalam perkembangan pendidikan tahun 1978-1983.

2. Penelitian dengan judul “Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus Dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru” yang ditulis oleh Edward Aria Jalu Taufan Putera yang berasal dari Universitas Sanata Dharma pada tahun 2018 yang membahas mengenai kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan) meliputi lahirnya kebijakan NKK/BKK pada masa pemerintahan Daoed Joesoef, pelaksanaan kebijakan NKK/BKK yang diwarnai aksi protes mahasiswa di Indonesia dan dampak dari kebijakan NKK/BKK yang mengekang gerakan mahasiswa pada saat itu.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu oleh Edward Aria Jalu Taufan Putera dengan penelitian yang akan hendak dikaji diantaranya:

- a. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas mengenai kebijakan NKK/BKK dan pelaksanaan kebijakan NKK/BKK dilakukan.
- b. Namun terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pada topik kajian, peneliti

sebelumnya membahas mengenai kebijakan NKK/BKK yang diwarnai aksi protes yang ada ketika kebijakan tersebut diberlakukan pada masa orde baru, sedangkan peneliti akan membahas mengenai kebijakan NKK/BKK yang merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan menteri pendidikan dan kebudayaan Daoed Joesoef pada tahun 1978-1983 dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.

3. Penelitian dengan judul “Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan” yang ditulis oleh Amalia Solihat, Abdul Syukur dan Kurniawati dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020 yang membahas mengenai kebijakan kontroversial Daoed Joesoef yaitu kebijakan perubahan tahun ajaran baru dan kebijakan libur bulan Ramadhan di berbagai jenjang pendidikan. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu oleh Amalia Solihat, Abdul Syukur dan Kurniawati dengan penelitian yang akan hendak dikaji diantaranya:
 - a. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan Daoed Joesoef tepatnya kebijakan perubahan tahun ajaran baru dan kebijakan libur bulan Ramadhan.
 - b. Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu pada topik kajian, peneliti terdahulu membahas mengenai kebijakan yang diterapkan Daoed Joesoef yaitu kebijakan perubahan tahun ajaran baru dan kebijakan libur bulan Ramadhan yang kontroversial sehingga adanya perdebatan dan aksi protes yang terjadi, sedangkan peneliti akan membahas mengenai kebijakan Menteri Daoed Joesoef yaitu kebijakan perubahan tahun ajaran baru dan kebijakan libur bulan Ramadhan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian meliputi:

- 3.1.1 Objek Penelitian : Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam Mengembangkan Pendidikan di Indonesia Tahun 1978-1983.
- 3.1.2 Subjek Penelitian : Kebijakan Menteri Daoed Joesoef
- 3.1.3 Tempat Penelitian : Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI)
- 3.1.4 Waktu Penelitian : Tahun 2023
- 3.1.5 Temporal Penelitian : Tahun 1978-1983
- 3.1.6 Bidang Penelitian : Sejarah

3.2 Metode Penelitian

Kata “metode” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*methodos*”, yang menggambarkan cara dan langkah yang digunakan dalam suatu tindakan atau proses. Sementara itu, kata “penelitian” yang berasal dari akar kata “*re*” yang memiliki arti kembali, dan “*search*” yang berarti mencari. Konteks “metode penelitian” mengaju kepada langkah-langkah sistematis yang diambil untuk terus-menerus mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan tertentu (Herlina, 2020).

Menurut Harahap (2001) menyatakan bahwa metode dalam konteks penelitian merupakan bagian dari metodologi yang berkaitan dengan penjelasan tentang teknik atau alat yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah cara yang ditempuh seorang peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang harus melalui tahap pengumpulan informasi atau pengumpulan data yang sesuai fakta sehingga data tersebut valid dan didasarkan pada tujuan atau kegunaan tertentu.

Selain penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara atau langkah yang sistematis dan digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam sebuah penelitian ilmiah. Metode penelitian membantu peneliti dalam mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian yang hendak dikaji menggunakan metode penelitian sejarah yang juga dikenal dengan metode historis karena metode penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang hendak dikaji yaitu kebijakan Menteri Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

3.2.1 Metode Historis

Penelitian metode historis menurut Helius Sjamsuddin (2012) adalah suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Helius Sjamsuddin, Abdurrahman (2007) mengungkapkan bahwa metode historis adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Penelitian yang menggunakan metode penelitian sejarah diartikan sebagai penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman, 2012). Metode dalam studi Sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen identik dan menjadi suatu kisah yang saling berhubungan sebagai bentuk pelaksanaan

dan teknis tentang bahan, kritik, dan interpretasi sejarah serta penyajian dalam bentuk tulisan (Madjid, 2008). Langkah-langkah dalam metode historis sebagai berikut;

1) Heuristik

Heuristik berasal dari Yunani kuno "*heuriskein*" yang berarti "mencari tahu" atau "menemukan" sehingga heuristik menggambarkan bagaimana seseorang mengambil sampel informasi. Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah yang dilaksanakan dengan aktivitas mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber sejarah (Sayono, 2021). Mencari sumber dan mengumpulkan sumber sebagian besar dilakukan melalui kegiatan bibliografi yang berarti publikasi dimana memutar daftar dokumen baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau bentuk keperpustakaan lain yang berhubungan dengan bidang sejarah (Sumargono, 2021). Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah dimana dengan heuristik ini peneliti akan menemukan sumber-sumber yang relevan untuk penelitiannya.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan judul penelitian. Sumber-sumber yang dimaksud antara lain buku, arsip, jurnal, skripsi, dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Peneliti menggunakan buku cetak maupun buku yang berbentuk *e-book* serta jurnal ilmiah yang diakses melalui *Google Scholar* (Google Cendekia), serta menelusuri *digital library* terkait penelitian yang hendak dikaji, dan pencarian sumber dengan mendatangi Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tahap heuristik ini peneliti mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah bahan utama dalam menyusun

historiografi namun harus melewati tahap metode sejarah berikutnya terlebih dahulu (Sayono, 2021). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diproduksi oleh orang yang hidup setelah waktu kejadian, kejadian yang dilaporkan/kesaksian yang bukan merupakan saksi pandangan mata, orang yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut (Pranoto, 2010). Peneliti akan mencantumkan sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang berupa dokumen dan arsip diperoleh peneliti dari ANRI dan Perpustakaan RI, sumber primer yang dimaksud diantaranya:

1. Pelita, 20 April 1979
2. Pelita, 10 Mei 1979
3. Pelita. 21 Juli 1980
4. Serial Media Dakwah No. 60 Tahun 1979
5. Serial Media Dakwah No. 62 Tahun 1979
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0266/K/1978 tentang Pungutan dan Penggunaan SPP-SL Akibat Adanya Perubahan Sistem Ajaran Sekolah
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi
10. Tempo, 15 April 1978
11. Tempo, 8 Juli 1978
12. Kompas, Kamis 13 April 1978
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) (1995) terkait 50 Tahun Pendidikan di Indonesia

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, *e-book* dan jurnal mengenai kebijakan Daoed Joesoef tahun 1978-1983, diantaranya:

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang berupa dokumen dan arsip diperoleh peneliti dari *e-book* serta jurnal ilmiah yang diakses melalui *Google Scholar* (Google Cendekia) dan Perpustakaan RI, sumber primer yang dimaksud diantaranya:

1. Karya ilmiah dari Edward Aria Jalu Taufan Putera (2018) terkait “Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru”
2. Karya ilmiah dari Ablyyu Riwanto (2022) terkait “Sekularisasi Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef Tahun 1978-1983 serta Dampaknya Terhadap Umat Islam”
3. Jurnal karya Safei & Hudaidah (2020) tentang “Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)”
4. Buku karangan Sardiman & Yulianti (2012) tentang “Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru (Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef dan Nugroho Notosusanto)”
5. Buku karya Marwan Saridjo (2007) terkait “Tragedi Daoed Joesoef: Catatan atas Otobiografi Dia dan Aku”
6. Buku karya Hadi Soesastro (1996) tentang “Nalar dan Naluri: 70 Tahun Daoed Joesoef”
7. Jurnal karya Amalia Solihat, Abdul Syukur & Kurniawati (2020) tentang “Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan”
8. Karya ilmiah karya Dede Suryadi (1999) berjudul “Proses Lahir dan Kontroversi NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) 1978-1983”

9. Rahayu Hardita Dwi Widyanti (2023) terkait Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: dari Malari hingga NKK/BKK

2) Kritik

Kritik sumber menjadi langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan sumber, kritik digunakan untuk mengkritisi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk membuktikan otentitas dan kredibilitasnya. Menurut Daliman dalam Sumargono (2021) menyebutkan bahwa pada tahap ini yang perlu diperiksa adalah validitas keaslian sumber yang diverifikasi oleh kritik eksternal dan validitas kebenaran (kredibilitas) sumber yang dikritik secara internal.

Kritik internal bertujuan untuk memverifikasi keakuratan (kredibilitas) fakta, sedangkan kritik eksternal berfungsi untuk mengevaluasi keaslian sumber. Kritik eksternal membantu menentukan apakah sumber tersebut asli atau palsu (Sjamsuddin, 2012). Sedangkan sumber internal mengacu pada kesaksian, yakni peran peneliti sebagai orang yang mengevaluasi sumber serta menilai kredibilitas sumber (Herdiani, 2016). Ada beberapa sumber yang akan melalui proses kritik, diantaranya:

1. Pelita, 20 April 1979
2. Pelita, 10 Mei 1979
3. Pelita. 21 Juli 1980
4. Serial Media Dakwah No. 60 Tahun 1979
5. Serial Media Dakwah No. 62 Tahun 1979
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0266/K/1978 tentang Pungutan dan Penggunaan SPP-SL Akibat Adanya Perubahan Sistem Ajaran Sekolah
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi
10. Tempo, 15 April 1978
11. Tempo, 8 Juli 1978
12. Kompas, Kamis 13 April 1978
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) (1995) terkait 50 Tahun Pendidikan di Indonesia

Tahap kritik sumber peneliti akan melakukan kritik pada sumber yang telah dikumpulkan. Kritik dilakukan baik dari segi fisik dan dari segi isi sumber. Jika dilihat melalui fisik sehingga peneliti dapat melihat apakah sumber yang dikumpulkan dapat terbukti keasliannya sesuai dengan aspek-aspek seperti gaya bahasa yang digunakan, gaya penulisan, dan sebagainya. Adapun dari segi isi, peneliti mencoba untuk melihat apakah sumber yang dikumpulkan mengandung informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji dalam hal ini adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

3) Interpretasi

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi dengan melakukan klasifikasi sumber dengan baik. Pada tahapan sebelumnya peneliti membedakan kritik eksternal dan internal untuk selanjutnya masuk ke dalam tahap interpretasi. Interpretasi menjadi tahap yang sangat penting, karena sumber yang berhasil di kritik dan telah dipastikan dijadikan sebagai bahan untuk penulisan sejarah akan ditafsirkan. Kuntowijoyo berpendapat bahwa seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi setelah itu (Sukmana, 2021).

Interpretasi diartikan sebagai proses penafsiran atau memberikan makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi nyata di masa lalu adalah hanya saksi-saksi bisu belaka maka untuk mengungkap makna yang signifikansi dirinya fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah masih memerlukan tindakan menyadarkan dirinya pada kekuatan informasi di luar ialah dari peneliti atau sejarawan (Daliman, 2018).

Pada tahap ini peneliti dituntut berhati-hati dan integritas untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang diperoleh agar ditemukan kesimpulan dan gambaran sejarah yang ilmiah pada sumber yang telah melalui tahap heuristik dan kritik pada data-data diatas berhubungan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti yaitu mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

4) Historiografi

Historiografi merupakan hal puncak dalam penulisan sejarah atau disebut juga dengan sebuah seni penulisan sejarah sebagai sastra sejarah atau berisi kumpulan tulisan-tulisan sejarah termasuk kaidah-kaidahnya (Herdiani, 2016). Historiografi merupakan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah. Tahap historiografi harus sesuai dengan kaidah logika dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sjamsudin dalam Sumargono (2021) mengatakan bahwa penulisan sejarah juga merupakan karya sastra yang memerlukan kejelasan struktur dan gaya bahasa, penekanan, dan retorika tertentu. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan langkah sejarawan dalam mengkomunikasikan hasil penelitiannya untuk diketahui secara umum. Penyusunan harus kronologis dan objektif. Sejarawan harus

merekonstruksi sumber-sumber sejarah yang telah ditemukannya menjadi suatu cerita sejarah secara sistematis.

Tahap ini penulis akan menyusun data-data yang sesuai dengan sumber-sumber yang telah melewati tiga tahapan sebelumnya menjadi rangkaian-rangkaian yang sesuai dengan kronologis dan sejarah yang sesuai dengan penelitian peneliti, dalam hal ini yaitu yang akan dirangkai menggunakan historiografi adalah hasil sumber-sumber kajian yang membahas mengenai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, maka agar mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis gambar maupun elektronik. Menurut Nanasudjana (1991) teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk melengkapi suatu data dalam rangka analisis yang diteliti, maka memerlukan informasi dan dokumen-dokumen yang ada dilakukan dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data baik berupa tulisan catatan, gambar, kebijakan atau benda mendukung sebuah penelitian.

Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983 baik berupa

arsip dan dokumen berupa surat keputusan yang terjadi pada masa pemerintahan Daoed Joesoef tersebut. Berikut arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian:

1. Pelita, 20 April 1979
2. Pelita, 10 Mei 1979
3. Pelita. 21 Juli 1980
4. Serial Media Dakwah No. 60 Tahun 1979
5. Serial Media Dakwah No. 62 Tahun 1979
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0266/K/1978 tentang Pungutan dan Penggunaan SPP-SL Akibat Adanya Perubahan Sistem Ajaran Sekolah
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi
10. Tempo, 15 April 1978
11. Tempo, 8 Juli 1978
12. Kompas, Kamis 13 April 1978
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) (1995) terkait 50 Tahun Pendidikan di Indonesia

b. Teknik Studi Pustaka

Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun. Teknik kepustakaan merupakan studi penelitian yang dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh di perpustakaan yaitu melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal dan majalah yang berkaitan

dengan masalah dan tujuan penelitian (Sayono, 2021). Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teknik studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mencari buku atau literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang diangkat. Peneliti menggunakan buku-buku baik cetak maupun *e-book* dan jurnal yang diakses melalui google cendekia. Berikut buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian:

1. Karya ilmiah dari Edward Aria Jalu Taufan Putera (2018) terkait “Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru”
2. Karya ilmiah dari Ablyyu Riwanto (2022) terkait “Sekularisasi Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef Tahun 1978-1983 serta Dampaknya Terhadap Umat Islam”
3. Jurnal karya Safei & Hudaidah (2020) tentang “Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)”
4. Buku karangan Sardiman & Yulianti (2012) tentang “Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru (Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef dan Nugroho Notosusanto)”
5. Buku karya Marwan Saridjo (2007) terkait “Tragedi Daoed Joesoef: Catatan atas Otobiografi Dia dan Aku”
6. Buku karya Hadi Soesastro (1996) tentang “Nalar dan Naluri: 70 Tahun Daoed Joesoef”
7. Jurnal karya Amalia Solihat, Abdul Syukur & Kurniawati (2020) tentang “Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan”
8. Karya ilmiah karya Dede Suryadi (1999) berjudul “Proses Lahir dan Kontroversi NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) 1978-1983”
9. Rahayu Hardita Dwi Widyanti (2023) terkait Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: dari Malari hingga NKK/BKK

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Peneliti memanfaatkan teknik analisis data historis karena bertujuan untuk menyusun kembali peristiwa masa lalu dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis data secara terstruktur dan objektif. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengonfirmasi fakta-fakta serta mencapai kesimpulan yang terkait dengan hipotesis tertentu. Peneliti menggunakan analisis data historis untuk mengkritisi situasi, perkembangan, dan pengalaman masa lalu dengan melakukan penilaian yang cermat terhadap sumber-sumber sejarah serta penafsiran dari informasi yang ada, untuk menilai tingkat keabsahan suatu sumber (Nurdin, 2019). Menurut Sjamsuddin (1996) analisis sejarah bermakna menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis tersebut.

Analisis sejarah memiliki tujuan untuk menyatukan berbagai fakta yang berasal dari berbagai sumber sejarah, serta menggabungkannya dengan teori-teori yang ada, sehingga dapat membentuk interpretasi yang komprehensif. Konteks teknik analisis data historis, prosesnya dimulai dengan pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, dalam penelitian yang terkait dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa Menteri Daoed Joesoef saat menjabat sebagai menteri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1978-1983 saat diterapkan kebijakan tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori dan metode, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai fakta sejarah dengan menggunakan fakta sejarah ini, peneliti dapat mengungkapkan cerita sejarah secara menyeluruh serta sesuai dengan sudut pandang peneliti.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia pada tahun 1978-1983 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kebijakan NKK/BKK yang memiliki salah satu tujuan untuk mengembalikan kampus pada pusat pengembangan akademik dan tidak ikut serta dalam politik praktis. Kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) tercantum dalam SK No. 0156/U/1978 sedangkan Kebijakan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) tercantum pada SK No. 037/U/1979. Adanya kebijakan NKK/BKK mahasiswa diatur agar lebih fokus dalam urusan akademik dibandingkan urusan kebangsaan sehingga kehidupan di lingkungan kampus tidak lagi dipenuhi oleh pemikiran kritis mahasiswa. Berlakunya kebijakan NKK/BKK tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mendapatkan tanggapan di kalangan mahasiswa yang ada di berbagai kampus di Indonesia karena mereka tidak setuju jika kebijakan tersebut diberlakukan. Kebijakan NKK/BKK, meskipun bertujuan baik, tetap menjadi subjek perdebatan karena dampaknya yang berbeda pada berbagai aspek kehidupan kampus dan kebebasan berpendapat. Namun, dari sisi positif, kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan fokus akademis, dukungan untuk kegiatan akademis, stabilitas lingkungan kampus, dan pengembangan keterampilan serta minat mahasiswa di berbagai bidang.
- 2) Kebijakan mengenai sistem tahun ajaran baru, dengan kebijakan tersebut maka perpanjangan waktu belajar selama enam bulan. Kebijakan tersebut tercantum pada SK No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah. Pada dampak positif kebijakan perubahan sistem tahun ajaran baru memberikan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem pendidikan di Indonesia. Penyesuaian ini tidak hanya

membantu sinkronisasi dengan kalender akademik internasional, tetapi juga mendukung efisiensi pengelolaan pendidikan, optimalisasi anggaran, dan memberikan waktu persiapan yang lebih baik bagi siswa dan mahasiswa. Dampak negatifnya adanya kebijakan tersebut maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef mengeluarkan kebijakan lain mengenai SPP-SL yang merupakan kebijakan terkait ketentuan dalam pemungutan biaya sekolah akibat bertambahnya waktu belajar selama enam bulan. Kebijakan tersebut juga menimbulkan tanggapan dari kalangan orang tua murid maupun guru karena bertambahnya waktu belajar dan bertambah pula biaya yang dikeluarkan.

- 3) Kebijakan lainnya yaitu mengenai waktu libur pada bulan puasa, yang dimana sebelum diberlakukan kebijakan tersebut sekolah-sekolah pada bulan puasa diliburkan, ketika kebijakan tersebut diberlakukan maka pada bulan puasa siswa tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kebijakan waktu libur pada bulan puasa tercantum pada SK No. 0211/U/1978 pada pasal 6. Dampak positif kebijakan tersebut yaitu tidak hanya mendukung kelancaran proses pembelajaran tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan karakter, manajemen waktu, dan pemahaman siswa tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Dengan demikian, kebijakan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan pribadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab, dan berwawasan luas. Suatu kebijakan ketika tidak hanya menimbulkan dampak positif namun terdapat dampak negatif dimana kebijakan tersebut mendapatkan tanggapan kurang menyenangkan yang dilakukan oleh umat Islam, Kalangan Ulama dan para ormas-ormas Islam yang tidak setuju Ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

Meskipun terdapat dampak negatif ketika kebijakan tersebut diberlakukan namun adanya dampak positif dari kebijakan tersebut dapat menata kembali pendidikan sehingga dapat mengembangkan pendidikan baik dari SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi di tahun 1978-1983 dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut juga dibarengi dengan hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia sehingga pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lain yang dilihat

dari kemajuannya maupun perkembangannya. Dari hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pada tahun tersebut terdapat peningkatan jumlah sekolah, bahan buku ajar, buku pelajaran dan juga peningkatan jumlah diploma di berbagai kampus. Tidak hanya itu saja, pada saat itu juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef berhasil menjadikan jumlah guru dan murid mengalami perkembangan yang cukup pesat di tahun 1978-1983.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyampaikan saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Perlunya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pada Tahun 1978-1983, karena banyak yang perlu dikaji lebih lanjut agar bisa memperoleh topik penelitian yang lebih jelas serta tidak hanya mengenai kebijakan dalam mengembangkan pendidikan namun juga dapat berbagai sudut pandang lain yang harus dikaji bagi peneliti selanjutnya seperti latar belakang terjadinya kebijakan tersebut dan lain sebagainya.

2. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat mengerti dan memahami terkait kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983. Hasil penelitian ini dapat mengetahui mengenai Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia tahun 1978-1983.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. (2014). *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Gorontalo: Ideal Publising.
- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ahmadi. (2013). *Manajemen Kurikulum Pendidikan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Arwildayanto, A. S., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Daliman, A. (2018). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Gelang Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). (1995). *50 Tahun Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Depdikbud.
- Dewantara, Ki Hajar. (1962). *Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Diputera, A. M., Damanik, S. H., & Wahyuni, V. (2022). Evaluasi kebijakan pendidikan karakter profil pelajar pancasila dalam kurikulum prototipe untuk pendidikan anak usia dini. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 8 (1), 1-12.
- El-As'ady, F. (2005). *Bone dalam Perspektif: Membongkar Fakta Menuju Bone Baru*. Jakarta: Pustaka Mapan.
- Elfani, N. F. (2017). Problematik Yuridis Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(2), 108-116.
- Gayatri, S. I., & Shalfiyanti (2009). *Sejarah Pemikiran Indonesia Tahun 1967-1998*. Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Haerullah, H., & Elihami, E. (2020). Dimensi perkembangan pendidikan formal dan non formal. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(1), 199-207.
- Harahap, S. S. (2001). *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*. Jakarta: Pustaka Quantum.

- Herdiani, E. (2016). Metode Sejarah dalam Penelitian Tari. *Jurnal Seni Makanan*, 3(2), 33-45.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Joesoef, D. (1982). Aspek-aspek Kebudayaan yang Harus dikuasai Guru, dalam *Majalah Kebudayaan*, no. 1.
- Joesoef, D. (2006). *Dia dan Aku Memoar Pencari Kebenaran*. Jakarta: Kompas.
- Joesoef, D. (2010). *Emak Penuntunku Dari Kampung Darat Sampai Sorbonne*. Jakarta: Kompas.
- Joesoef, D. (2015). *Borobudur Warisan Umat Manusia*. Jakarta: Kompas.
- Joesoef, D. (2015). *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Joesoef, D. (2017). *Rekam Jejak Anak Tiga Zaman*. Jakarta: Kompas.
Kompas, 8 Agustus 2016.
Kompas, Kamis 13 April 1978.
- Lubis, T.M. & Abdullah, F. (1981). *Langit Masih Mendung: Laporan Keadaan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia 1980*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Maguire, M. (2019). Equality and Justice in Education Policy. *Journal of Education Policy*. 34 (3).
- Markum, E (Ed). (2007). *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
Merdeka, 15 Juni 1978.
- Nata, A. (2001). *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo, cet. ke-2.
- Noeng, M. (2010). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurdin I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
Pelita, 10 Mei 1979.

Pelita, 20 April 1979.

Pelita. 21 Juli 1980.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pour, J. (1997). *Laksamana Sudomo: Mengatasi Gelombang Kehidupan*. Jakarta: Gramedia.

Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pratama, R. (2013). Nilai, Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Ditambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat Kota Kediri). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.

Putera, E.A.J.T. (2018). Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Era Orde Baru. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan. Jakarta.

Riwanto, A. (2022). Sekularisasi Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef Tahun 1978-1983 serta Dampaknya Terhadap Umat Islam. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas*, 7(1), 1-15.

Sardiman & Yulianti. (2012). *Dinamika Pendidikan Masa Orde Baru (Kebijakan Pendidikan Daoed Joesoef dan Nugroho Notosusanto)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Saridjo, M. (2007). *Tragedi Daoed Joesoef: Catatan atas Otobiorafi Dia dan Aku*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara.

Sayono, J. (2021). Langkah-langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 15(2), 369-376.

Serial Media Dakwah No. 60 Tahun 1979.

Serial Media Dakwah No. 62 Tahun 1979.

Siregar, MB., Haruni, CW., & Anoraga, S. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum Indonesia*, 1 (1), 88-110.

- Sitorus, M. (2012). *Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Perdana Publishing.
- Sjamsudin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soesastro, H., dkk. (1996). *Nalar dan Naluri: 70 Tahun Daoed Joesoef*. Jakarta: CSIS.
- Solihat, A., & Syukur, A. (2020). Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983: Perubahan Tahun Ajaran dan Libur Bulan Ramadhan. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Subanar, G.B. (2018). Bagaimana Peran dan Posisi Universitas di Indonesia pada Jaman ini. *Seminar Nasional*. Universitas Kristen Krida Wacana.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukmana, W.J. (2021). Metode Penelitian Sejarah. *Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1-4.
- Sumargono. (2021). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0266/K/1978 tentang Pungutan dan Penggunaan SPP-SL Akibat Adanya Perubahan Sistem Ajaran Sekolah.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Suryadi, D. (1999). Proses Lahir dan Kontroversi NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) 1978-1983. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Syamsudin, Helius. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tempo, 15 April 1978
- Tempo, 8 Juli 1978

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Werner, H. (1957). The Concept of Development from a Comparative and Organismic Point of View. In D. B. Haris (Ed), *The concept of development* (pp. 125-148). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Widyanti, R.H.D, dkk. (2023). Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: dari Malari hingga NKK/BKK. *Chronologia*, 4 (3), 140-153.